

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ajang penting bagi setiap partai politik untuk berupaya memenangkan persaingan elektoral. Karena Pemilu adalah satu-satunya mekanisme konstitusional yang memberi ruang bagi partai politik untuk memperebutkan kekuasaan setiap lima tahun, maka berbagai strategi pun ditempuh untuk meraih kemenangan. Pemilihan strategi kampanye yang efektif serta proses pelembagaan partai yang berjalan optimal menjadi faktor krusial dalam meningkatkan perolehan suara. Tidak dapat disangkal bahwa partai politik merupakan kekuatan utama yang memainkan peran penting dalam dinamika politik di banyak negara. Di Indonesia pun, sejak masa awal hingga sekarang, partai politik terus memberikan kontribusi besar dalam perkembangan kehidupan politik nasional.

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan (Miriam Budiardjo. 2010.). Partai politik dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang berupaya memperjuangkan nilai-nilai atau ideologi tertentu dengan cara memperoleh dan mengendalikan struktur kekuasaan, yang salah satu jalannya adalah melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Lebih jauh, partai politik merupakan organisasi yang berlandaskan ideologi tertentu dan bertujuan meraih posisi kekuasaan politik. Keberadaan partai politik sangat berkaitan erat dengan aktivitas pemerintahan dalam suatu negara. Dalam konteks sistem demokrasi yang dianut Indonesia, negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam proses dan kegiatan pemerintahan.

Partai politik yang mengikuti Pemilu perlu menempuh berbagai upaya untuk menarik simpati masyarakat dan memperoleh suara sebanyak mungkin. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat basis dukungan melalui pemetaan wilayah-wilayah yang menjadi kantong suara mereka, serta membangun citra dan strategi kampanye yang mampu meningkatkan elektabilitas partai di mata publik. Pada hakikatnya, strategi kampanye politik bertujuan membentuk rangkaian makna politis dalam benak pemilih sehingga memengaruhi orientasi perilaku mereka untuk memilih partai tertentu. Pemilihan strategi kampanye yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan partai pada Pemilu. Namun, faktor yang lebih mendasar untuk meningkatkan peluang kemenangan ialah kemampuan partai membangun fondasi yang kuat pada berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, termasuk sistem kepartaian, kualitas kader, struktur kepengurusan, simpatisan, hingga jejaring dengan pihak luar yang dapat menunjang keberhasilan partai.

Dalam konteks pelembagaan partai politik, pelembagaan secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya memaksimalkan fungsi-fungsi partai dalam merespons berbagai dinamika, baik yang muncul dari dalam organisasi maupun dari lingkungan eksternal. Kemampuan partai untuk menyelesaikan persoalan internal serta menanggapi tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat akan berpengaruh pada tingkat loyalitas, perluasan basis dukungan, dan keberlanjutan partai itu sendiri. Soliditas dan kematangan internal sebuah partai tercermin dari tingkat pelembagaan yang dicapai, yang menunjukkan kesungguhan partai dalam membangun landasan nilai serta dalam upaya memenangkan kompetisi elektoral.

Keberhasilan pelembagaan partai politik tercermin dari kemampuan partai dalam membangun serta mempertahankan stabilitas nilai di tengah meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari capaian perolehan suara partai dalam kompetisi pemilihan umum, yang menjadi indikator sejauh mana pelembagaan partai telah

berfungsi secara efektif, baik pada ranah legislatif maupun eksekutif pada periode sebelumnya. Berangkat dari urgensi pelembagaan partai tersebut, partai politik dituntut untuk terus memperkuat dan mengoptimalkan struktur kelembagaannya masing-masing agar mampu menghimpun dukungan konstituen secara maksimal di setiap daerah, baik dalam pemilu tingkat lokal maupun nasional. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting bagi partai politik untuk memenangkan kontestasi pemilu dan memperoleh kursi di lembaga perwakilan rakyat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelembagaan partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menopang keberlangsungan demokrasi serta menjaga stabilitas politik. Oleh karena itu, penguatan pelembagaan partai merupakan kebutuhan yang bersifat fundamental dan tidak dapat dihindari. Pelembagaan partai yang kuat akan mendorong partai politik menjalankan aktivitas dan perannya secara konsisten sesuai dengan prinsip, aturan, serta fungsi-fungsi kelembagaan partai sebagaimana yang telah ditetapkan.

Saat ini partai politik menghadapi berbagai persoalan kompleks, salah satunya lemahnya proses pelembagaan partai. Banyak partai belum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk tuntutan regulatif seperti ambang batas parlemen yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketentuan ini mengharuskan partai memperoleh suara minimal agar dapat mengirimkan wakil ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang tentu menjadi tantangan berat bagi partai yang belum memiliki basis kekuatan yang solid. Tingkat pelembagaan partai sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu partai, karena pelembagaan mengatur bagaimana partai menjalankan peran dan fungsinya sekaligus menyelesaikan berbagai konflik, baik yang bersumber dari internal maupun dari luar organisasi.

Persaingan elektoral di Indonesia semakin kompleks seiring penerapan sistem multipartai dan proporsional terbuka. Pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga kandidat legislatif secara langsung. Kondisi ini membuat faktor popularitas individu, strategi kampanye, serta loyalitas terhadap partai sama-sama menentukan hasil akhir. Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki makna strategis dalam dinamika ini. DPRD memegang fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Semakin banyak kursi yang diraih sebuah partai, semakin besar pula pengaruhnya dalam membentuk koalisi dan mengarahkan kebijakan lokal. Sebaliknya, penurunan jumlah kursi dapat menjadi indikator melemahnya basis dukungan, lemahnya konsolidasi internal, atau kegagalan dalam merespons isu-isu lokal yang relevan.

Partai Demokrat lahir pada 9 September 2001 sebagai partai politik berhaluan demokratis. Sehari setelah dideklarasikan, yakni pada 10 September 2001, partai ini resmi didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI (Faizal, 2005). Meskipun tergolong masih muda, Partai Demokrat langsung ikut serta dalam Pemilu 2004. Pada saat itu, Demokrat menjadi salah satu dari 24 partai politik yang bersaing memperebutkan kursi di parlemen. Hasil pemilu pertama cukup mengejutkan. Dalam usianya yang belum genap tiga tahun, Partai Demokrat berhasil menempati peringkat kelima perolehan suara nasional, dengan capaian 8.455.225 suara (7,45%). Perolehan tersebut mengantarkan Demokrat meraih 57 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lebih jauh, momentum Pemilu 2004 juga menjadi jalan bagi Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu pendiri Demokrat, untuk terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keenam sekaligus presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui dua putaran, yaitu pada 5 Juli dan 20 September 2004. Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2009, Partai Demokrat semakin mengukuhkan eksistensinya dalam kontestasi politik nasional. Dari posisi kelima pada pemilu sebelumnya, Demokrat berhasil keluar sebagai pemenang. Dari 38 partai yang bersaing, Demokrat meraih

21.703.137 suara (20,85%), yang setara dengan 148 kursi DPR atau sekitar 26,42% dari total kursi. Capaian ini menjadikan Partai Demokrat sebagai kekuatan politik dominan dalam periode kedua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Secara tipologis, Demokrat dapat dipandang sebagai partai beraliran nasionalis-modernis dengan orientasi pada pembangunan (developmentalisme) serta kebangsaan. Hal ini sesuai dengan tipologi partai politik yang dikemukakan Daniel Dhakidae (2003), yang menyebutkan adanya pergeseran orientasi partai di Indonesia ke arah sosialisme, globalisme, developmentalisme, dan kebangsaan. Dalam praktiknya di Kota Makassar, Demokrat mencoba memadukan strategi politik modern dengan pendekatan yang populis guna meraih simpati masyarakat. Untuk melihat lebih jelas dinamika perolehan suara Partai Demokrat di Kota Makassar, data periode 2014 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Perolehan Suara Partai Pemilu Periode 2014-2024 Kota Makassar

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara		
	2014	2019	2024
Golkar	85.909	72.981	97.209
PDIP	49.616	63.864	56.840
Nasdem	59.313	92.651	94.756
Demokrat	86.612	77.083	50.415
Gerindra	72.238	67.820	75.758

Sumber: *Hasil Pemilu 2024*, kota-makassar.kpu.go.id, diolah oleh peneliti tahun 2025

Tabel 1.2

Perolehan Kursi Partai Demokrat Periode 2014-2024

Partai Politik	Jumlah Kursi Dalam Periode		
	2014	2019	2024
Golkar	8	5	6
PDIP	4	6	5
Nasdem	5	6	8
Demokrat	7	6	3
Gerindra	5	7	6

Sumber: *Hasil Pemilu 2024*, kota-makassar.kpu.go.id, diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan data perolehan suara Pemilu legislatif di Kota Makassar, Partai Demokrat menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam tiga periode terakhir. Pada Pemilu 2014, Demokrat memperoleh 86.612 suara dan berhasil menempatkan 7 kursi di DPRD Kota Makassar. Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2019, perolehan suara turun menjadi 77.083 suara, yang berdampak pada berkurangnya representasi Demokrat menjadi 6 kursi. Penurunan yang lebih drastis terjadi pada Pemilu 2024, ketika partai ini hanya meraih 50.415 suara dan tersisa 3 kursi, menandai merosotnya dukungan elektoral secara signifikan.

Sementara itu, partai-partai pesaing justru menunjukkan perkembangan berbeda. Partai Golkar, yang memperoleh 85.909 suara pada 2014 dan sempat menurun menjadi 72.981 suara pada 2019, kembali bangkit pada 2024 dengan torehan 97.209 suara. Partai Nasdem juga mengalami

kenaikan yang kuat, dari 59.313 suara pada 2014 menjadi 92.651 suara pada 2019, dan relatif stabil pada Pemilu 2024 dengan 94.756 suara. PDIP mencatat 49.616 suara pada 2014, meningkat menjadi 63.864 suara di 2019, lalu sedikit menurun pada 2024 dengan perolehan 56.840 suara.

Menurunnya perolehan suara Partai Demokrat di Kota Makassar merupakan isu strategis dalam kajian politik elektoral, karena penurunan tersebut juga berimplikasi langsung pada berkurangnya kursi Demokrat di DPRD Kota Makassar dari waktu ke waktu. Fenomena ini bukan sekadar indikasi melemahnya basis dukungan pemilih, tetapi juga dapat mencerminkan adanya problem internal partai, seperti lemahnya konsolidasi organisasi, kurang solidnya kader, atau tidak optimalnya proses pelembagaan partai. Di sisi lain, faktor eksternal turut berperan, terutama meningkatnya kompetisi dari partai-partai lain seperti Golkar dan Nasdem yang justru menunjukkan tren penguatan elektoral di Kota Makassar.

Pergeseran dukungan ini menjadi aspek penting untuk diteliti karena dapat mengungkap dinamika politik lokal yang lebih kompleks, khususnya bagaimana Partai Demokrat merespons perubahan perilaku pemilih, tekanan elektoral dari partai pesaing, dan kebutuhan adaptasi strategi politik di tingkat daerah. Pemahaman atas penyebab penurunan kursi ini juga menjadi relevan untuk melihat sejauh mana partai mampu mempertahankan eksistensinya dalam kontestasi politik lokal yang semakin kompetitif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi merosotnya perolehan kursi Partai Demokrat di Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul: "Dinamika Elektoral Partai Demokrat di Kota Makassar: Analisis Penurunan Perolehan Kursi DPRD pada Pemilu 2024."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana proses pelembagaan Partai

Demokrat di Kota Makassar memengaruhi penurunan perolehan kursi pada Pemilu Legislatif 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Menganalisis penyebab terjadinya penurunan perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2024 di kota Makassar

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan analisis pengembangan Ilmu Politik, khususnya dalam kajian mengenai penurunan perolehan kursi partai politik. Fokus pada kasus Partai Demokrat di Kota makassar dalam pemilu legislatif 2024 diharapkan dapat memperkaya diskursus akademis terkait dinamika elektoral dan perubahan perilaku pemilih tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi yang bermanfaat bagi masyarakat luas mengenai dinamika politik yang mempengaruhi penurunan kursi partai dalam pemilu. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi partai politik, termasuk Partai Demokrat, dalam mengevaluasi kinerja dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil Pemilu Kota Makassar 2024.

1.5. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Yusril Yuwanda dalam jurnal berjudul “Analisis Penurunan Perolehan Suara Anggota DPD RI Dapil Aceh pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Penurunan Perolehan Suara Fachrul Razi)” pada tahun 2022. Jurnal ini membahas penurunan suara Fachrul Razi, anggota DPD RI Dapil Aceh, pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014, dukungan besar dari Partai Aceh dan eks kombatan Gam menjadi kunci keberhasilannya. Namun, pada 2019, dukungan ini menurun drastis akibat kekecewaan terhadap janji politik yang tidak terealisasi, lemahnya komunikasi politik Fachrul dengan eks

kombatan Gam, dan penurunan basis suara pendukung. Kegagalan Fachrul merawat hubungan politiknya menjadi penyebab utama kehilangan dukungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori komunikasi politik sebagai landasan analisis. (Yusril Yuwanda, 2022).

Kedua, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nanang Suryana, Ari Ganjar Ardiansyah, dan Firman Manan berjudul “Pelebagaan Partai Politik: Studi pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019”. Dalam penelitian tersebut, Nanang Suryana dkk mengkaji proses pelembagaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), khususnya pada tingkat Kota Bandung pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan internal PSI Kota Bandung masih menghadapi sejumlah kelemahan, sehingga diperlukan upaya pembenahan dan penguatan kelembagaan yang dapat dimulai dari aspek-aspek fundamental dalam manajemen organisasi. Sebelum berkembang menjadi partai politik yang memiliki kekuatan politik secara signifikan, PSI Kota Bandung terlebih dahulu dituntut untuk membangun kekuatan dari sisi tata kelola dan manajerial organisasi. Selain itu, PSI Kota Bandung perlu mampu menginternalisasikan serta menerjemahkan narasi dan gagasan strategis yang diusung oleh DPP PSI agar selaras dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Meskipun demikian, secara umum proses pelembagaan PSI Kota Bandung dinilai masih berada dalam kondisi yang dinamis. Dalam penelitian ini, Nanang Suryana dkk menggunakan kerangka teori pelembagaan partai dari Randall dan Svåsand serta menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. (Nanang Suryana, dkk. 2020.).

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Hatta Abdi Muhammad, Nabil Lintang Pamungkas, dan Dony Anggara berjudul “Kegagalan Partai Politik Baru di Provinsi Jambi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dalam Perspektif Pelebagaan Politik”. Dalam artikel tersebut, Hatta Abdi Muhammad dkk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan partai politik baru gagal memperoleh capaian elektoral yang optimal pada Pemilu Legislatif 2019 di Provinsi Jambi. Penelitian ini berupaya mengaitkan kegagalan tersebut dengan dua aspek utama, yakni kualitas figur calon legislatif serta tingkat pelembagaan partai politik dengan menggunakan kerangka teori Randall dan Svåsand. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegagalan partai politik baru di Provinsi Jambi disebabkan oleh ketidakmampuan partai dalam menghadirkan figur calon legislatif yang memiliki daya tarik dan kapasitas elektoral untuk meningkatkan perolehan suara partai. Selain itu, model pelembagaan partai sebagaimana dikemukakan oleh Randall dan

Svåsand dinilai belum mampu menjangkau dan beradaptasi dengan karakteristik masyarakat yang masih kuat dengan budaya politik tradisional. Penelitian ini menggunakan teori pelebagaan partai dari Randall dan Svåsand serta menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. (Hatta Abdi Muhammad Dkk. 2020.).

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kajian-kajian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara pelebagaan partai politik dan dinamika perolehan suara dalam kontestasi elektoral. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari sisi kerangka teori, pendekatan konseptual, lokasi penelitian, maupun karakteristik fenomena yang dikaji. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam penelitian ilmiah dan justru menjadi bagian penting dalam menghadirkan kebaruan kajian serta memperkaya khazanah keilmuan.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pelebagaan Partai Demokrat Kota Makassar serta kaitannya dengan penurunan perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Adapun perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teori pelebagaan partai yang dikemukakan oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroh sebagai kerangka analisis utama dalam menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, belum banyak kajian yang secara eksplisit menggunakan teori pelebagaan partai dari Basedau dan Stroh, khususnya dalam konteks partai politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik baru dalam memahami dinamika pelebagaan partai politik serta implikasinya terhadap kinerja elektoral partai di tingkat daerah.

1.6. Kajian Teori

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia menunjukkan transformasi yang signifikan dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi negara sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Pada masa awal kemerdekaan, partai politik berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun struktur negara baru. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peran partai politik, termasuk Partai Demokrat, mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan global, serta perubahan dalam pemilihan umum.

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, Partai Demokrat di Kota Makassar mengalami penurunan perolehan kursi yang cukup signifikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor internal partai, seperti seleksi calon legislatif (caleg), kualitas kampanye, dan strategi politik partai, memiliki pengaruh besar terhadap perolehan suara dalam pemilu.

1. 6. 1 Partai Politik

Partai Politik memiliki posisi dan peran yang sentral serta penting dalam sistem demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan yang dijalankan saat ini menuntut kehadiran partai politik sebagai pilar yang berfungsi sebagai perantara antara proses penyelenggaraan pemerintahan dan warga negara. Aktivitas partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Apabila partai politik dapat berfungsi dan berperan dengan baik, maka kualitas demokrasipun akan menjadi baik, dan begitu pula sebaliknya.

Ramlan Subakti menyatakan bahwa partai adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terorganisir secara sistematis dan stabil, yang bertujuan untuk meraih serta mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui proses pemilihan umum, dengan maksud untuk melaksanakan berbagai alternatif kebijakan publik yang telah dirumuskan (Efriza, 2024). Selain itu, setiap anggota partai politik memiliki orientasi, nilai-nilai, atau tujuan yang serupa (Budiarjo, 1998).

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan partai politik merupakan organisasi politik resmi yang dari pengurus sampai kadernya mempunyai cita-cita, harapan dan kepentingan yang sama dalam memperoleh kekuasaan konstitusional melalui proses politik yaitu pemilu. Sistem kepartaian di Indonesia menggunakan sistem multipartai atau banyak partai. Seiring dengan banyaknya partai politik yang bermunculan dalam proses demokrasi di Indonesia sejak diterapkannya sistem multipartai tentunya secara tidak langsung memengaruhi peta persaingan partai. Hal ini menyebabkan persaingan politik antar partai semakin ketat. Persaingan ini terutama terlihat dalam konteks pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Partai politik saling berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan pemerintahan negara melalui mekanisme pemilihan umum legislatif dan

pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara secara umum partai politik mempunyai fungsi utama sebagai alat komunikasi dan sosialisasi politik, wadah rekrutmen politik, saluran aspirasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi politik masyarakat, pemandu kepentingan, kontrol politik, dan manajemen konflik (Surbakti, 2010).

1. 6. 2 Pemilu Legislatif

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana bagi bangsa dan negara untuk menjalankan demokrasi. Pemilu menjadi sebuah instrumen kelembagaan penting yang memuat perwujudan asas demokrasi dalam suatu negara yang menganutnya. Dalam Pemilu ada tiga syarat yang dipenuhi sebagai ciri negara demokrasi, yaitu adanya kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan jaminan hak-hak sipil dan politik (Suryanto, 2018). Oleh karena itu, dalam negara yang menganut nilai-nilai demokrasi, pemilu memiliki peran penting sebagai sebuah peristiwa politik. Pemilu, sebagaimana diatur dalam konstitusi, memiliki makna yang jelas dan spesifik. Prinsip-prinsip dasar pemilu yang esensial seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil harus dijamin dalam konstitusi. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar individu yang terpilih melalui pemilu dapat menjalankan tugas pemerintahan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Sejak kemerdekaan hingga kini, sistem kepartaian yang dipraktikkan oleh Indonesia adalah sistem multipartai. Dengan diberlakukannya sistem pemilu proporsional dan multipartai nyatanya telah membuat persaingan yang ketat dalam ajang pemilu legislatif. Dimana terjadi persaingan antar calon anggota legislatif dimana persaingan itu terjadi pada partai yang sama, tidak hanya antar calon partai yang berbeda. Partai pada hakekatnya merupakan kendaraan politik bagi orang-orang yang akan mencalonkan diri untuk kursi legislatif, sesuai dengan fungsi partai politik saat ini. Tanpa fungsi partai, caleg akan terpaksa melakukan kampanye tanpa memperhatikan platform karena hanya akan berjuang untuk dirinya sendiri, yakni untuk mendapatkan suara terbanyak. Kandidat akan menggunakan setiap tindakan yang memungkinkan, termasuk yang legal (diizinkan) dan ilegal untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari para pendukungnya (Sibarani, 2016).

1. 6. 3 Pelembagaan Partai

Dalam upaya memecahkan dan menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori pelembagaan partai oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroh. kerangka teori pelembagaan partai. Permasalahan yang dikaji difokuskan pada keterkaitan antara tingkat pelembagaan partai dan penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif Kota Makassar 2024. Teori pelembagaan partai yang dikembangkan oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroh dijadikan sebagai landasan utama. Pemilihan teori serta pendekatan yang relevan dengan fokus penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan konseptual yang kuat sehingga analisis dapat dilakukan secara terarah, sistematis, dan mendalam dalam menjelaskan hubungan antara pelembagaan partai politik dengan merosotnya dukungan elektoral Partai Demokrat.

Berbagai ahli telah memberikan kontribusi pemikiran mereka mengenai pelembagaan partai politik. Teori pelembagaan partai oleh Basedau dan Stroh merupakan pengembangan dari teori pelembagaan politik yang diajukan oleh Randall dan Svasand. Menurut Randall dan Svasand, pelembagaan partai adalah sebuah proses peningkatan partai politik melalui aspek struktural dan kultural yang diterapkan dalam etika dan budaya (Svasand dan Randall, 2002). Menurut pandangan Randall dan Svasand, pelembagaan partai politik dipahami sebagai proses penyempurnaan partai yang berlandaskan pada aspek struktural dan kultural, yang kemudian diwujudkan dalam etika serta budaya organisasi. Dalam kerangka tersebut, Randall membagi pelembagaan partai ke dalam dua kategori utama, yakni aspek internal–eksternal serta aspek struktural–kultural. Berdasarkan pemikiran tersebut, Basedau dan Stroh kemudian melakukan pengembangan dengan merumuskan empat dimensi pelembagaan partai, yaitu pengakaran dalam masyarakat, tingkat otonomi, kapasitas organisasi, serta koherensi internal. Lebih jauh, prinsip umum dalam mengukur pelembagaan partai menekankan tiga wawasan teoritis penting. Pertama, pengukuran pelembagaan partai harus dipisahkan dari pelembagaan sistem kepartaian. Kedua, pelembagaan pada dasarnya terkait dengan upaya meningkatkan stabilitas, kualitas, dan internalisasi nilai dalam partai. Ketiga, pelembagaan organisasi dipandang sebagai hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, teori pelembagaan partai yang dikemukakan oleh Basedau dan Stroh dapat dipahami sebagai hasil modifikasi dan pengembangan dari kerangka teoritis yang sebelumnya

diperkenalkan oleh Randall dan Svasand (2002).

Samuel P. Huntington (1973) berpendapat bahwa pelebagaan merupakan suatu proses yang menekankan pada prosedur dan pengorganisasian, yang di dalamnya terkandung nilai serta stabilitas. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pelebagaan partai politik dapat dilihat melalui empat aspek utama, yaitu penyesuaian diri–kekuatan, kompleksitas–kesederhanaan, otonomi–subordinasi, dan koherensi–perpecahan (Romli, 2016). Dalam sistem demokrasi multipartai, keberadaan partai politik menjadi sangat penting karena berfungsi mengorganisir kompetisi politik sekaligus sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, partai politik dan demokrasi merupakan dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan hal tersebut, Basedau dan Stroh menegaskan bahwa pelebagaan partai merupakan proses yang dialami oleh partai politik ketika mengikuti kontestasi elektoral dan berusaha meningkatkan stabilitas serta kualitas nilai-nilai organisasinya. Nilai-nilai tersebut semakin kuat apabila diakui dan diyakini oleh pihak-pihak yang relevan, baik kader maupun pemilih, bahwa partai politik adalah bagian penting dari sistem demokrasi yang tidak bisa diabaikan (Syafriidho, 2022).

Pemilihan teori pelebagaan oleh Matthias basedau dan Alexander Stroh dianggap lebih tepat karena mampu mengurai secara mendalam fenomena yang terjadi pada Partai Demokrat di Kota Makassar, di mana penurunan kursi dapat dianalisis secara mendalam melalui aspek stabilitas dan internalisasi nilai secara bersamaan. Berbeda dengan pendekatan Huntington yang bersifat umum, Basedau dan Stroh memberikan ruang untuk menguji sejauh mana hubungan partai dengan organisasi masyarakat sipil serta bagaimana otonomi partai terjaga dari intervensi aktor dominan atau faksi internal yang dapat mengganggu soliditas elektoral. Di sisi lain, teori Randall dan Svasand memang memberikan fondasi penting melalui pembagian dimensi internal-eksternal serta struktural-kultural, namun Basedau dan Stroh melakukan pengembangan dengan mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut ke dalam empat indeks kelembagaan yang lebih terukur, yaitu pengakaran dalam masyarakat (*roots in society*), otonomi (*autonomy*), kapasitas organisasi (*level of organization*), dan koherensi (*coherence*). Dengan demikian, teori Basedau dan Stroh tidak hanya berfungsi sebagai alat deskriptif, tetapi sebagai pisau analisis yang lebih tajam dan komprehensif untuk menjelaskan hubungan kausal antara rapuhnya pelebagaan internal dengan merosotnya dukungan suara pada Pemilu

2024.

Dalam sistem demokrasi yang mengadopsi sistem multipartai, partai politik memiliki tujuan utama untuk mengorganisasi kompetisi politik serta memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan demikian, partai politik dan demokrasi merupakan dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan penjelasan Basedau dan Stroh, pelebagaan partai adalah proses yang dialami oleh partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, yang kemudian meningkatkan stabilitas serta nilai-nilai dalam organisasi tersebut. Peningkatan nilai-nilai ini dipahami oleh sebagian orang, terutama anggota partai dan pemilih, yang percaya bahwa keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi sangat penting dan tak boleh diabaikan.

Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai modifikasinya terhadap teori pelebagaan partai politik oleh Randal dan Svasand yang mengelompokan pelebagaan partai, Basedau dan Stroh membagi klasifikasi pelebagaan partai kedalam empat dimensi indeks kelembagaan, yaitu sebagai berikut :

a. Mengakar Dalam Masyarakat (*roots in society*)

Partai politik yang dikelola dengan baik harus memiliki stabilitas yang kuat dan mendalam di masyarakat. Artinya, partai tersebut harus mampu menarik perhatian dan mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Mendapatkan tempat tersebut bukanlah hal yang mudah; hal itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat tercapai dengan instan. Partai politik perlu menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan fungsi-fungsi partai dengan baik dalam merespons masalah-masalah yang ada di masyarakat serta menjadi saluran aspirasi bagi publik. Jika fungsi-fungsi ini dijalankan dengan baik, maka partai akan mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Basedau dan Stroh, terdapat tiga indikator yang dapat menentukan apakah sebuah partai berhasil mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat, atau dengan kata lain, telah memenuhi kriteria untuk mengakar di masyarakat. Pertama, usia partai relatif terhadap kemerdekaan, maka semakin dikenal dan diterima masyarakat. Kedua, usia partai relatif terhadap periode multipartai, yang memiliki makna serupa dengan yang pertama, yaitu dalam sistem multipartai, partai yang sudah dikenal di masyarakat tidak perlu khawatir. Terakhir, partai

politik harus memiliki hubungan yang baik dengan organisasi masyarakat sipil, yang akan membantu memperkenalkan partai tersebut kepada masyarakat lebih luas, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami partai itu.

b. Otonomi (*autonomy*)

Partai politik dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pelembagaan yang berakar di tengah masyarakat dengan otonomi organisasi. Otonomi di sini dipahami sebagai kemampuan partai untuk memainkan peran penting dalam setiap proses kebijakan pemerintahan sekaligus memastikan keberlangsungan organisasinya. Sebuah partai yang memiliki pelembagaan kuat cenderung lebih sulit dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak luar dalam menentukan sikap maupun kebijakan. Meski demikian, intervensi dari aktor-aktor kuat yang berada di dalam tubuh partai hampir tidak bisa sepenuhnya dihindari. Oleh karena itu, penting bagi partai untuk meminimalisasi dominasi tersebut dengan menanamkan nilai-nilai independensi di kalangan kadernya. Jika kader tidak memiliki sikap mandiri terhadap berbagai pengaruh, maka nilai-nilai internal partai sulit untuk benar-benar diinternalisasi dan dijalankan. Kehadiran pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok berpotensi menjadikan partai hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Dengan demikian, otonomi yang tegas dan terjaga dapat berfungsi sebagai benteng untuk mengurangi intervensi, sekaligus memastikan bahwa partai tetap berjalan sesuai dengan kepentingan kolektif, bukan semata kepentingan individu tertentu.

c. Kekuatan Organisasi (*level of organization*)

Di tingkat internal, partai politik dituntut memiliki kekuatan organisasi sebagai indikator penting dalam menilai sejauh mana pelembagaannya telah terbentuk. Kekuatan organisasi berfungsi menjaga stabilitas dan keharmonisan internal, sekaligus menumbuhkan semangat perjuangan bagi para kader. Militansi kader dalam mengemban fungsi partai sesuai dengan ideologi, visi, dan misi yang dimiliki menjadi salah satu tolok ukur penting atas soliditas organisasi. Selain itu, kepatuhan partai dalam menyelenggarakan kongres atau musyawarah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) juga menjadi cerminan kedisiplinan kelembagaan.

Lebih jauh, kualitas kader dan anggota merupakan faktor krusial yang memengaruhi kekuatan organisasi. Kehadiran kader yang kompeten dan berintegritas akan memperkuat kapasitas internal partai, baik dalam fungsi legislasi maupun kerja-kerja politik lainnya. Tidak hanya itu, aspek manajerial juga turut menentukan, misalnya pemeliharaan fasilitas kantor, kedisiplinan personel, ketersediaan sarana penunjang seperti perangkat teknologi, serta kelengkapan materi informasi. Keaktifan partai dalam berbagai aktivitas sosial dan politik di luar masa kampanye pemilu menunjukkan bahwa partai memiliki vitalitas organisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kekuatan organisasi tidak hanya diukur dari aspek struktural, tetapi juga dari konsistensi partai dalam menghidupkan dinamika politik sehari-hari, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi partai dalam kontestasi elektoral maupun dalam menjalankan fungsi representasi.

d. Koherensi (coherence)

Pada prinsipnya, partai politik harus beroperasi sebagai satu kesatuan organisasi, bukan sebagai kelompok atau individu terpisah di dalam partai tersebut. Koherensi dapat dipahami sebagai kelompok atau individu terpisah di dalam partai tersebut dan kemampuan partai politik untuk menoleransi dan menyelesaikan perselisihan yang muncul di internal partai. Oleh karena itu, tujuan utama dari koherensi adalah untuk menyelaraskan visi, misi, dan arah tujuan partai. Berdasarkan Basedau dan Stroh, terdapat dua indikator kualitatif yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat koherensi dalam partai politik. Pertama, prevalensi (jumlah anggota yang melakukan pemberontakan) atau perbedaan pendapat dan/atau pemberontakan dari kelompok parlemen selama masa jabatan legislatif. Pemimpin partai dapat mentoleransi beberapa kader yang melakukan pemberontakan tanpa menggunakan kekerasan verbal, ancaman, atau upaya pengusiran, asalkan pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran besar yang bertentangan dengan anggaran dasar dan prinsip-prinsip partai. Kedua, sifat politik intrapartai dapat dievaluasi melalui analisis politik faksional oleh divisi atau badan-badan internal partai. Keberagaman dalam divisi atau badan-badan partai tidak menjadi masalah, asalkan terjalin keharmonisan di antara kelompok-kelompok tersebut (Basedau dan Stroh, 2011). Koherensi dilakukan untuk menciptakan partai politik yang stabil dan minim penyimpangan serta konflik di dalam internal partai.

Tabel 1.3
Tabel Pelembagaan Partai Politik Menurut Basedau dan Stroh

	Eksternal	Internal
Stability	Roots in society	Level of organization
Value Infusion	Autonomy	Coherence

Teori pelembagaan partai yang dikemukakan oleh Basedai dan Stroh menekankan pentingnya tingkat kelembagaan internal partai politik dalam menentukan kinerja dan keberlanjutan eksistensinya dalam menentukan kinerja dan keberlanjutan eksistensinya dalam sistem politik. Pelembagaan partai merujuk pada proses di mana partai menjadi entitas politik yang stabil, memiliki akar sosial yang kuat, diakui legitimasi politiknya, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan politik dan sosial. Dalam kerangka ini, terdapat empat indikator utama pelembagaan partai yaitu, stabilitas organisasi, akar sosial, legitimasi, dan kapasitas adaptasi.

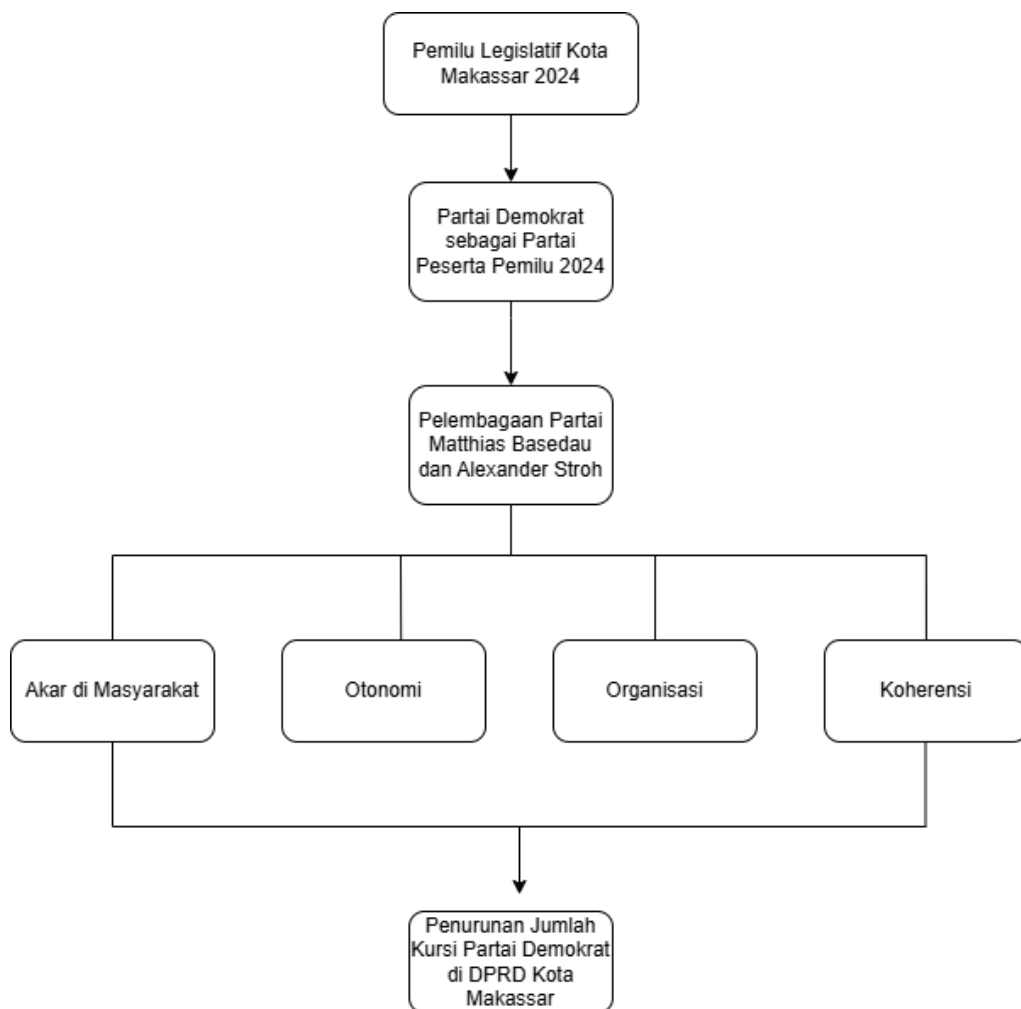
Relevansi teori ini terhadap penelitian mengenai Dinamika Penurunan Perolehan Kursi DPRD Partai Demokrat di Kota Makassar terletak pada kemampuannya memberikan kerangka analisis yang komperhensif terhadap faktor-faktor internal partai yang mempengaruhi kinerja elektoral. Penurunan jumlah kursi yang diperoleh Partai Demokrat pada Pemilu 2024 di Kota Makassar tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana tingkat pelembagaan partai tersebut terpenuhi.

Dengan menggunakan perspektif pelembagaan partai, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya performa elektoral partai demokrat di Kota Makassar secara sistematis. Teori ini tidak hanya memotret penurunan perolehan kursi secara deskriptif, tetapi juga mengkaji secara analitis bagaimana tingkat kelembagaan partai mempengaruhi kemampuan Partai Demokrat dalam mempertahankan dukungan publik di tengah kompetisi politik yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu, penerapan teori pelembagaan partai dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam sejauh mana empat dimensi pelembagaan terimplementasi dalam tubuh Partai Demokrat Kota Makassar, serta bagaimana kondisi masing-masing dimensi tersebut berkontribusi terhadap penurunan perolehan kursi DPRD pada Pemilu 2024. Analisis ini diharapkan mampu

mengungkapkan hubungan antara kualitas kelembagaan internal partai dengan performa elektoralnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penyebab melemahnya dukungan pemilih. Dengan demikian, kerangka teori pelebagaan partai menjadi relevan dan signifikan sebagai pisau analisis dalam memahami dinamika elektoral Partai demokrat di tingkat lokal, khususnya dalam konteks persaingan politik di Kota Makassar.

1.7. Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian sesuai dengan fokus kajian yang diteliti oleh peneliti. Penentuan lokasi penelitian memiliki peranan yang sangat penting, terlebih penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga diperlukan spesifikasi lokasi yang jelas agar proses pengumpulan dan pendalaman data dapat dilakukan secara optimal. Dengan adanya penetapan lokasi yang terfokus, peneliti diharapkan lebih mudah dalam menggali fenomena yang diteliti secara mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan titik fokus pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Makassar yang beralamat di Jalan Mirah Seruni No. 30, Kecamatan Panakkukang. Pemilihan DPC Partai Demokrat Kota Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis lembaga tersebut sebagai struktur utama partai dalam mengelola organisasi, menjalankan fungsi pelebagaan partai, serta mengoordinasikan aktivitas kepartaian di tingkat lokal.

2.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif berfokus pada proses analisis yang menitikberatkan pada konstruksi yang terbentuk melalui interaksi sosial, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Jenis analisis ini berpijak pada filosofi konstruksionisme, yang meyakini bahwa kebenaran bersifat relatif dan subjektif, tergantung pada perspektif individu atau kelompok masyarakat di suatu wilayah (Herdiansyah, 2015).

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan data deskriptif yang dapat berupa pernyataan lisan maupun dokumen tertulis. Dalam pelaksanaannya, objek penelitian mencakup Pengurus DPD Partai Demokrat, Pengurus DPC Partai Demokrat, Kader Partai Demokrat. Penelitian akan berinteraksi langsung dengan para narasumber tersebut untuk melakukan komunikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan.

Langkah-langkah dalam metode analisis kualitatif mencakup

pengolahan dan pendalaman data yang diperoleh dari lapangan, untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell (2017), studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk menggali fenomena kehidupan nyata secara mendalam, dalam hal ini terkait dengan penurunan perolehan kursi DPRD Partai Demokrat Kota Makassar serta hambatan-hambatan yang dihadapi, yang kemudian dianalisis berdasarkan data empiris dari lapangan.

2.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh pengumpul data yang bersumber dari narasumber atau informan (sugiyono, 2019). Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara yang dilakukan penulis. Adapun data primer pada penelitian ini dihasilkan oleh hasil wawancara penulis terhadap sejumlah narasumber, yaitu Pengurus DPD Partai Demokrat, Pengurus DPC Partai Demokrat, Kader Partai Demokrat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat digunakan sebagai pendukung dari adanya data primer yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berasal dari arsip-arsip, dokumentasi, literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik yang relevan yakni penurunan perolehan kursi Partai Demokrat. Adapun dokumen yang di dapatkan melalui internet yang dapat diakses secara umum seperti halnya laman *website* KPU RI untuk melihat perolehan suara partai khususnya Partai Demokrat dalam penyelenggaraan pemilu.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah strategis yang memegang peranan penting dalam penelitian. Oleh karenanya dalam sebuah penelitian harus mengaplikasikan teknik yang merujuk pada metode untuk menghimpun informasi yang diperlukan. Kehadiran teknik pengumpulan data yang tepat sangatlah krusial, karena tanpanya, peneliti tidak akan mampu mendapatkan data yang memenuhi standar yang diperlukan. Data sendiri merupakan

elemen kunci dalam menjalankan sebuah penelitian. Keabsahan data sangatlah penting, karena data yang diperoleh dengan cara yang tidak tepat dapat menghasilkan data yang tidak akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam

Dalam usaha mengumpulkan data primer, peneliti menerapkan teknik wawancara mendalam dengan berbagai pihak atau informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin pada subjek penelitian (Gunawan, 2017). Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung ke Partai Demokrat untuk memperoleh data yang diperlukan.

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur sampling, dimana prosedur ini menjelaskan bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Untuk mengambil atau memilih sampel (informan kunci) peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melakukannya dengan sengaja. Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah sampel. Dalam hal ini, jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi bisa juga banyak, terutama tergantung dari a) tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan b) kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti (Buthan Bungin, 2003).

Dalam penelitian ini, kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti adalah pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun mengetahui dengan jelas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 1.4
Daftar Informan

No.	Informan	
	Nama	Jabatan
1.	H. Ray Suryadi Arsyad, S.Ip.	Wakil Ketua I DPC Demokrat Makassar
2.	Harry Kurnia P., SE	Wakil Ketua III DPC Demokrat Makassar
3.	Zulkifli Tahir, SE	Ketua BPOKK-CAB DPC Partai Demokrat Kota Makassar
4.	Wahyuddin	Sekretaris BPOKK (Badan

	Syahrudin, S.H.	Pembinaan Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan) DPD Demokrat
5.	Andi Ali Armunanto, SIP.,M.Si.	Pengamat Politik Universitas Hasanuddin

2. Dokumentasi

Teknik yang berfungsi sebagai bukti bahwasanya telah dilaksanakan pengumpulan data disebut sebagai dokumentasi. Dokumentasi juga didefinisikan sebagai langkah untuk memperoleh gambaran yang berasal dari kacamata penulis dengan memanfaatkan media tulis atau media lainnya yang disajikan oleh peneliti yang bersangkutan (Herdiansyah, 2015). Pelaksanaan studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun berbagai data yang dibutuhkan melalui sejumlah sumber, baik dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam penyediaan data penelitian maupun melalui sumber daring yang dapat diakses secara berkelanjutan. Data yang diperoleh dari instansi resmi, hal ini DPC Partai Demokrat, meliputi Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Makassar dan daftar calon legislatif Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2024.

2.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis dan mengolah data yang diperoleh dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti, yaitu analisis data induktif. Analisis data induktif merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan analisis terhadap suatu data yang merupakan hasil dari temuan peneliti yang berupa fakta kemudian data-data tersebut disusun menjadi suatu kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Rony Zulfirman, 2023), teknik analisis data dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam konteks ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang tercatat dari observasi lapangan. Proses pengurangan data merupakan bagian penting dari analisis yang melibatkan penyaringan, pengelompokan, penajaman fokus, serta pengorganisasian data dengan cermat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat dan valid.

2. Menyajikan Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyajikan data. Teks naratif maupun tabel dapat digunakan dalam menyajikan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya merancang dan menggabungkan data-data yang diperoleh di lapangan untuk diolah dan ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data yang optimal menjadi landasan kritis dalam analisis kualitatif yang sah, memungkinkan pemahaman menyeluruh terhadap konteks penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada, temuan bisa berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas atau berupa hubungan interaktif, hipotesis dan teori (Sugiyono, 2011).